

Internalisasi Nilai Nilai Pancasila Dan Nasionalisme

Javanese aspect in spiritual life of Susilo Bambang Yudhono, the Indonesian president.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi bagian terpenting dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak era pra kemerdekaan hingga reformasi ini. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan sebagai cara hidup (way of life) seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kini sudah tidak zamannya, Pancasila hanya diajarkan secara formal dan kaku di bangku pendidikan, namun yang terpenting justru penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengungkap seluk beluk Pancasila dalam perspektif seorang santri, mengingat beberapa bagian dari buku ini merupakan hasil dialektika dan diskusi kelas dengan mahasiswa Ma’had Aly Al-Iman Purworejo. Titik tekan buku ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan ideologis mahasiswa terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia serta membangkitkan (kembali) semangat hubb al-wathan min al-îmân, sebagai bagian dari komitmen santri terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapital multikultural pesantren ini diharapkan dapat menambah khazanah baru bagi diskursus pendidikan multikultural. Kajian ini juga membuka kesadaran bahwa soal keragaman, pesantren sebenarnya memiliki kapital multikultural yang berharga dan bisa didayagunakan sebaik mungkin untuk mengambil peran dalam membangun kehidupan multikultural.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek-moyang masyarakat dan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbagai nilai positif dari seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai cikal bakal bangsa Indonesia terkristalisasi dalam rumusan Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah hanya satu-satunya dan tidak ada pembanding atau tidak ada saingannya dalam negara. Dari dasar negara itu kemudian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai dan jiwa yang dikandung dalam Pancasila. Demikian pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia diimplementasikan dari nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Secara substansial, Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah selesai dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan pada saat penggalian dan perumusannya dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai tindakan yang tepat, sehingga tidak mendirikan negara agama atau negara berdasarkan agama tertentu. Pancasila akan menaungi seluruh kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pergaulan masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia harus memahami dengan baik nilai-nilai tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan sekaligus melakukan aktualisasi nilai-nilai tersebut.

Belajar spiritual bersama "The thinking general"

KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI ASWAJA DALAM BERBAGAI SENDI KEHIDUPAN

Bunga Rampai ISU-ISU KRUSIAL TENTANG RADIKALISME DAN SEPARATISME

Pendidikan Pancasila

revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna membentuk karakter bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional

Tabloid Reformata Edisi 39 Juni 2006

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah mampu mengimplementasikan nilai kehidupan yang terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tentu erat kaitannya dengan agama, Ahlussunnah Wa Jama’ah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam. Nilai kehidupan Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara sangat relevan dengan nilai Pancasila mengingat pendirian bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan, dan Pancasila sendiri merupakan filsafat, ideologi, juga paradigma kehidupan bangsa Indonesia.

Perpaduan nilai Pancasila dengan nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah akan menciptakan generasi yang berkarakter, berjihad religius serta mampu meningkatkan rasa cinta tanah air. Tentunya hal tersebut sangat selaras dengan konsep bela negara pada sistem pertahanan negara yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakanhasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berlakunya asas kelangsungan usaha. Padahal penormaan asas kelangsungan usaha disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketiadaan metode Uji Insolvensi, juga menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Padahal dengan menerapkan metode Uji Insolvensi sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim dapat melindungi debitor. Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan, mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitor pailit setelah pernyataan pailit diucapkan. Kondisi tersebut menimbulkan keniscayaan, bahwa hakim dalam perkara niaga tidak pernah mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Padahal nyata- nyata menempatkan debitor yang perusahaannya masih memiliki prospek bisnis dan solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi debitor.

Pendidikan PancasilaUpaya Internalisasi Nilai - Nilai KebangsaanPenerbit Unika Atma Jaya Jakarta

Buku ini membahas secara mendalam tentang pikiran-pikiran filsafat Pancasila dari dua filsuf besar, yakni Prof., Dr. Notonagoro dan Prof., Dr. N. Drijarkara, SJ. Keduanya tidak diragukan lagi sebagai filsuf yang memberikan kontribusi besar bagi perumusan atau pengembangan filsafat Pancasila. Dengan latar belakang pendidikan filsafat dan sosio-kultural yang berbeda, membandingkan pemikiran kedua filsuf ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang filsafat Pancasila. Notonagoro dengan pendekatan esensialistik-nya berhasil merumuskan hakikat filsafat Pancasila yang besifat mutlak dan universal, sedangkan Drijarkara dengan pendekatan fenomenologi-eksistensialistik-nya berhasil membuktikan bahwa Pancasila merupakan cerminan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Selain menawarkan rekonstruktif atas filsafat Pancasila, buku ini juga menyajikan usaha untuk mengontekstualisasikan filsafat Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara

Research for Social Justice

Globalization

Seminar PPSA XIX Lemhannas RI tahun 2013

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI PANCASILA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Studi Kasus di Universitas Lampung dan UIN Raden Intan

Kongres Pancasila IV ini merupakan rangkaian dan kesinambungan dari Kongres Pancasila sebelumnya, yaitu Kongres Pancasila I tgl 1 Juni 2009 di Yogyakarta; Kongres Pancasila II tgl. 1 Juni 2010 di Denpasar; dan Kongres Pancasila III tgl.1 Juni 2011 di Surabaya. Dari tiga kali Kongres Pancasila tersebut telah banyak dihasilkan rumusan-rumusan deklarasi yang sangat berkualitas dan bermakna. Atas dasar hasil-hasil yang telah dicapai dari Kongres Pancasila sebelumnya itu, maka pada Kongres Pancasila IV kali ini dipilih dan ditetapkan tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Tema ini dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Saat ini tidak ada lembaga khusus pengawal Pancasila. Padahal, diakui atau tidak Pancasila adalah dasar Negara Indonesia. Keadaan ini dinilai jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Saat itu, MPR mempunyai berbagai wewenang, dan salah satunya “memelihara” Pancasila. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila itu menyebabkan Pancasila kehilangan dasar legitimasi kenegaraannya. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila, berimplikasi pada tidak adanya mekanisme yang jelas dalam mensosialisasikan Pancasila. Peran tersebut saat ini nampaknya berusaha dimainkan oleh MPR dengan slogan kebanggaannya “4 Pilar Hidup Bernegara” yang mensejajarkan posisi Pancasila dengan NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari ketidaktepatan konsep dasar yang ada dalam slogan itu, kita mengakui bahwa MPR memiliki niat baik untuk membumikan Pancasila. Saat ini tidak ada rambu-rambu pengimplementasian Pancasila yang jelas dan baku. Padahal, rambu-rambu itu mutlak diperlukan agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, rambu-rambu itu perlu segera diadakan. Mempertimbangkan hal-hal diatas, kiranya perlu ada upaya serius untuk membentuk atau menunjuk lembaga khusus pengawal Pancasila, yang nantinya diberi wewenang, antara lain untuk menyusun rambu-rambu pengimplementasian Pancasila tersebut secara tepat, terstruktur, dinamis dankontekstual.

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1 Bahasa Teologis Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja) sangatlah seksi untuk didiskusikan. Apalagi dalam diskursus Islam di dunia, Aswaja kini mendapatkan ujian berat. Banyak negara muslim di Timur Tengah yang mayoritas menganut aliran Sunni tengah dilanda Arabian Spring. Mereka baku hantam sesama muslim dan menjadi bulan-bulanan negeri Barat yang menganggap Islam sebagai “musuh”nya. Islam yang oleh Barat distigma negatif tentu menjadi objek yang disepelekan, dihina bahkan dicaci maki. Mereka menganggap Islam sebagai agama teroris dan menebar ancaman. Tentu ini salah. Islam tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, kaum Barat. Islam Aswaja memiliki konsep ilmiah, amaliyah dan harakah yang sangat baik, penebar kedamaian dan tentu saja agama yang benar-benar memanusiakan manusia dan tak mengizinkan setetespun darah manusia ditumpahkan. Namun, fakta bahwa peperangan dan perseteruan antara kaum Muslim di negara-negara Islam menjadi validitas dan pembenaran atas tuduhan itu. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk menampilkan Islam yang ramah dan damai. Islam Nusantara yang digagas PBMU adalah solusi. Indonesia telah membuktikan bahwa Islam adalah solusi terbaik bagi Islam dunia untuk meneguhkan kemanusiaan, demokrasi dan peradaban dunia. Islam ala Nusantara yang bukan merupakan aliran atau tipologi baru adalah Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, kesetaraan dan tentu saja saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Buku ini mengenalkan secara operasional melalui bahasa teologis akan Islam Nusantara yakni Aswaja. Beberapa konsep yang ditawarkan dalam buku ini pun menjadi bagian organik dari Islam Nusantara dan Islam rahmatan lil alamin yang menjadi tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Keamanan dan kedamaian negeri ini adalah bukti bahwa Islam Nusantara memiliki kekhasan walaupun harus diuji oleh ragam ras, Bahasa, kelompok, ribuan pulau dan puluhan bangsa. Islam Nusantara dan Aswaja ala Indonesia pun bisa menjadi solusi dunia Islam dalam menghadapi krisis multi dimensi ini. Buku ini pun bisa membantu semua pembaca dalam memahami bagaimana Aswaja dibaca melalui ragam bidang ilmu dan diaktualisasikan dalam ragam konteks kehidupan.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang mengharapkan adanya buku ajar ini sebagai panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Buku yang tengah ada dihadapan pembaca saat ini adalah kumpulan materi-materi ajar, baik itu mata kuliah Pancasila maupun mata kuliah Kewarganegaraan. Disusunnya bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menjadi opsi referensi bagi para dosen/pendidik dan mahasiswa dan civitas academica yang ada di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Akhirnya, harapan penulis sejak lama dapat terwujud dengan hadirnya buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai panduan perkuliahan mata kuliah PPKn. Sebagaimana penyusunan buku ajar yang lain, penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna baik dari materi dan susunannya. Dengan lapang dada dan kerendahan hati, penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki buku ini agar lebih baik lagi.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam dinamika demokrasi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia

Gagasan Millennial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045

Buletin Perpustakaan Bung Karno. Th. XI / Vol. 1 / 2019

Aktualisasinya bagi Demokrasi Indonesia

Prosiding Kongres Pancasila V 2013

Pada Era Revolusi Industri 4.0 Ini Indonesia Sedang Mengalami Bonus Demografi Yang Cukup Baik, Oleh karena itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan Indonesia emas pada tahun 2045. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya disegala aspek penting bangsa ini yakni aspek Pendidikan, Ekonomi, Politik, dan Sosial Budaya. Merespon akan hal tersebut, buku ini berisi tentang gagasan atau ide ide segar yang mendukung aspek yang disebutkan sebelumnya dari kaum milenial dan Generasi Z yang merupakan representasi dari Bonus Demografi itu sendiri. Diharapkan para pembaca dapat terinspirasi dari gagasan yang diberikan dari para penerus bangsa ini, terutama pemerintah, agar niat baik berupa ide dari para penulis dapat diimplementasikan untuk pembangunan bangsa yang lebih baik lagi kedepannya untuk Indonesia Emas 2045. [Fianosa Publishing, Indonesia, Ebook, Digital]

Tantangan terhadap Pancasila memang berasal baik dari ideologi sayap kanan maupun sayap kiri. Hanya saja, konflik Pancasila dengan agama adalah yang paling memiliki dinamika panjang. Bagi beberapa kelompok agama di Indonesia, selalu ada garis demarkasi yang memisahkan Pancasila dengan agama. Di beberapa ormas Islam, hal demikian itu bukan hanya bersifat politis tetapi juga ideologis. Ada landasan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang membuat nilai-nilai Pancasila tidak dapat berjalan beriringan dengan agama. Bagi manusia-manusia Indonesia sebagai suatu bangsa, persoalan ini tentu sangat pelik karena membawa eseks negatif terhadap stabilitas politik dan dapat menjadi ancaman bagi integrasi yang telah lama terbentuk. Apa yang dihadirkan dalam buku ini adalah mencoba mencari titik keseimbangan antara nilai-nilai agama yang bersifat transenden dan nilai-nilai Pancasila yang bersifat imanen. Untuk melakukannya, memang tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap sila-sila dalam Pancasila, yang dalam hal ini penafsirannya mutlak membutuhkan berbagai perangkat ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu bahasa, politik, ideologi, sosiologi, hukum, sejarah, sampai filsafat. Dengan demikian, apa yang ditemukan setidaknya dapat menjadi diskursus, analisis serta refleksi di tengah kehidupan beragama bangsa Indonesia yang selalu dinamis.

Pancasila memiliki salah satu peran sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala tatanan hukum di negara Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Namun faktanya, banyak Undang Undang bahkan Perda-Perda atau Pergub, Perpub dan Perwali dibatalkan baik oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung atau Kemendagri RI (pada saat masih memiliki kewenangan). Hal itu dikarenakan Undang-Undang atau Perda-Perda itu tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap nuansa kesesuaian peraturan perundangan dengan Pancasila itu? Buku "Persepsi dan Sikap Warga Negara terhadap Pancasila" menjadi salah satu bahan yang dapat menjawab hal tersebut. Buku ini juga memuat bagaimana hubungan antara Pancasila dan Budaya dari perspektif psikologi, relevansi Pancasila dengan peraturan Perundang-undangan serta hubungan antara sikap dan persepsi masyarakat terhadap kesesuaian peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi buku referensi dalam melihat bagaimana sikap dan persepsi masyarakat Indonesia apabila mengetahui terdapat peraturan Perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Dengan memahami bagaimana masyarakat bersikap, buku ini akan bermanfaat untuk peminat pengembangan program Pendidikan Karakter Pancasila di seluruh Nusantara.

Isu-isu mengenai hakikat dan ruang lingkup kajian proble-matika Pendidikan Ekonomi; eksistensi profesionalisme guru ekonomi dalam meningkatkan kualitas pendidikan; kesiapan mengajar calon guru Ekonomi Indonesia; membangun inter-koneksi antara pendidikan formal, non formal, dan informal dalam konteks pendidikan sepanjang hayat di Indonesia; trans-formasi dan digitalisasi pendidikan ekonomi meningkatkan atensi peserta didik di masa pandemi; pendidikan karakter dalam pendidikan ekonomi; implementasi keteladanan guru da-lam pembelajaran ekonomi; pembelajaran pendidikan ke-uangan melalui teori pembentukan kebiasaan dalam pendid-ikan informal; penyederhanaan materi pembelajaran bagi guru ekonomi di Indonesia; upaya pengenalan ekonomi sirkuler dalam pengajaran dan implementasinya di Indonesia; dan rele-vansi lulusan pendidikan ekonomi di era digital 4.0 dibahas tuntas di dalam buku ini. Buku yang hadir di hadapan para pembaca dengan judul “ Problematika Pendidikan Ekonomi (Suatu Analisis dan Kajian Praktis ” merupakan buku yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan para akademisi baik pemula ataupun ahli, dalam mempelajari dan mendalami ekonomi, khususnya pada ranah pendidikan ekonomi. Buku ini terdiri atas sebelas bab dimana di dalamnya membahas problem-problem pokok yang ditemukan dalam pembelajaran pendidikan ekonomi. Oleh karenanya buku ini memiliki harapan bisa digunakan secara menyeluruh oleh para mahasiswa dan akademisi dalam mempelajari pendidikan ekonomi.

Mimbar

Interkulturalisme dan Globalisasi-Internasionalisasi

Upaya Memajukan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0

Problematika Pendidikan Ekonomi; Suatu Analisis Filosofis dan Kajian Praktis

Proceedings of the 1st International Conference on Citizenship Education and Democratic Issues (ICCEDI 2020), Malang, Indonesia, October 14, 2020

Buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku "Pancasila di Era Milenial" ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri dari 10 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya : Esensi dan Urgensi Pancasila Pada Generasi Milenial; Pancasila Sebagai Pembangunan Karakter Generasi Milenial; Pancasila Sebagai Sistem Filsafat; Nasionalisme Dalam Pancasila; Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Urgensi Pancasila Ssebagai Ideologi; Implementasi Pancasila Dalam Produk Kebijakan Negara; Sumber Historis Memahami Pancasila; Sumber Yuridis Memahami Pancasila; dan Pancasila Sebagai Budaya dan Kepribadian Bangsa.

A stimulating appraisal of a crucial contemporary theme, this comprehensive analysis of globalization offers a distinctively cultural perspective on the social theory of the contemporary world. This perspective considers the world as a whole, going beyond conventional distinctions between the global and the local and between the universal and the particular. Its cultural approach emphasizes the political and economic significance of shifting conceptions of, and forms of participation in, an increasingly compressed world. At the same time the book shows why culture has become a globally contested issue – why, for example, competing conceptions of 'world order' have political and economic consequences.

ICCEDI is an international seminar that is held every two years organized by the Law and Citizenship Department, Faculty of Social Science Universitas Negeri Malang. The activities aim to discuss the theoretical and practical citizenship education that becomes needed for democracy in Indonesia and other countries with a view to build academic networks by gathering academics from various research institutes and universities. Citizenship education is an urgent need for the nation in order to build a civilized democracy for several reasons. Citizenship education is important for those who are politically illiterate and do not know how to work the democracy of its institutions. Another problem is the increasing political apathy, indicated by the limited involvement of citizens in the political process. These conditions show how citizenship education becomes the means needed by a democratic country like Indonesia. The book addresses a number of important issues, such as law issues, philosophy of moral values, political government, socio-cultural and Pancasila, and civic education. Finally, it offers a conceptual framework for future democracy. This book will be of interest to students, scholars, and practitioners, governance, and other related stakeholders.

Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya yang konkret dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19 dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional.

The Proceedings of the 4th International Conference of Social Science and Education, ICSSED 2020, August 4-5 2020, Yogyakarta, Indonesia

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)

Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia

AKTUALISASI NILAI PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI DI PROPINSI LAMPUNG

Kapital Multikultural Pesantren

Individuals are equipped with a wide range of knowledge that enhances their employability, health, family life, and social engagement. On this basis, providing equality for all has been set to be achieved as one of the United Nations sustainable development priorities. However, the international understandings are not only of what equality and inclusivity entail but also the social vision to achieve social justice. Best practices provide a meaningful cross-national

discussion with respect to the following topics: power relations within research, social inequalities in society, science research for social justice, the redefinition of the notion of social justice, education for social justice, spatial justice, the research of gender and marginalized groups, the re-conceptualization of the epistemological foundation of research, hegemonic discourses on research, science technology for social justice and welfare, as well as culture and social justice. This edited book aims to provide a new perspective for other benefits of research because generally, the research carried out only aims to answer scientific problems and often override aspects of humanities. In response to these concerns, the book attempts to re-map the main objectives of the research. The authors in this book offer new perspectives, especially in formulating the purposes of the studies they will perform. Therefore, this book presents a unique review of research with a variety of approaches that are coherent with the state of society in the world, followed by eleven scopes of various cases from a variety of perspectives that highlight theoretical and methodological questions about research and social justice. This book presents outstanding applications through multiple types of approaches that are relevant to the current context of world community issues. The articles in this book will be of interest to undergraduate and graduate students, as well as researchers who are interested in the social field, especially research for social justice.

Buku ini merupakan bahan bacaan bagi mahasiswa untuk matakuliah Pendidikan Pancasila. Sengaja disebut sebagai bahan bacaan, karena nilai - nilai yang ada dalam Pancasila tidak bisa direduksi dalam rumusan-rumusan baku, melainkan harus digali terus menerus melalui bacaan - bacaan dan pengalaman konkret di lapangan. Dengan upaya ini nilai-nilai Pancasila yang diterima oleh generasi bangsa menjadi sesuatu yang hidup. Buku ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa dan dosen pancasila.

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia
Book Chapter ini berisikan tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya book chapter ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Radikalisme dan Sparatisme.

EKONOMI INDONESIA

Mengukuhkan Karakter Kebangsaan

MERAWAT NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEBHINNEKAAN DI TENGAH COVID-19

PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI

Studi Field Research di SMPN 2 Pagerwojo

Pancasila Di Era Milenial

Buku ini adalah buku yang memberikan jawaban atas keagaulan sosial yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih masyarakat kampus seperti Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (JPOK) Program Studi Pendidikan Jasmani

Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.

The theme of the conference is "Reconstructing Morals, Education, and Social Sciences for Achieving Sustainable Development Goals". This theme was formulated due to several considerations. First, the symptoms of moral decline that have the potential to destroy the nation. Morals guide humanity towards truth and civilization. The phenomenon of the dehumanization process in the industrial era that pushed people to be part of abstract societies tends to ignore humanity. The education process as a humanitarian system is increasingly marginalized, especially during discussions about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The conference placed six sub-themes for speakers and participants to share ideas, namely: Social Sciences and Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and Communication, Education. The committee has received 195 abstracts from prospective speakers. However, there are only 80 abstracts that are eligible to be presented at this conference.

Beberapa riset mutakhir menyebutkan bahwa Pancasila mendapatkan tantangan nyata. Salah satunya adalah radikalisme berbasis keagamaan yang juga menyasar banyak perguruan tinggi. Sebab itulah, perlu diadakan riset terhadap aktualisasi Pancasila di Perguruan Tinggi. Buku ini menyajikan hasil riset mutakhir tentang bagaimana Pancasila diaktualisasikan oleh mahasiswa di dua perguruan tinggi di Lampung, yakni UIN Raden Intan dan Universitas Lampung.

Sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting, dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat dengan perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkatan perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh guru melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah, mempunyai peran penting dalam upaya pembinaan siswa untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian, tanggung jawab dan cinta tanah air juga mampu menerapkan dalam kehidupannya.

Rumedia - Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKN

Proceedings of the International Seminar on Research for Social Justice (ISRISJ 2018), October 30, 2018, Bandung, Indonesia

Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII

Wujud Internalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PANDUAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI

BAB 1. Dasar-dasar Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945 1 Makna Sistem Ekonomi Pancasila..... 2 Makna Pasal 33 UUD 1945 7 2. Dinamika Kebijakan Fiskal Indonesia 15 Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Indonesia 16 Teori Kebijakan Fiskal 18 Tujuan Kebijakan Fiskal 19 Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal yang menginternalisasikan nilai-nilai keindonesiaan 22 Macam-macam Kebijakan Anggaran/Fiskal 24 3. Bank Sentral dan Sektor Perbankan 27 Kedudukan Bank Indonesia (BI) 28 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Sebagai Wujud Internalisasi Nilai-nilai Keindonesiaan 30 Tugas Bank Indonesia 32 Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi ... 34 4. Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi 37 Pengangguran 38 Kemiskinan 42 Ketimpangan Ekonomi 44 5. Infrastruktur dan Iklim Investasi 47 Pembangunan Infrastruktur 48 Reformasi Birokrasi 49 Investasi 51 6. Kedaulatan Pangan Nasional 53 Sektor Pertanian Indonesia 54 Kendala Pengembangan Sektor Pertanian 57 7. Pembangunan Ekonomi Daerah 59 Ekonomi Daerah 60 Permasalahan dalam Pembangunan

Ekonomi Daerah.. 63 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 67 Paradigma baru dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 70 Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 74

""Saya Joko Widodo, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim telah menerima manda dari Ibu Megawati Sukarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon Presiden RI. Untuk melapangkan jalan kemenangan menuju Pilpres, mari bersama-sama bergotong-royong Bekerjalah dengan santun, tetap rendah hati, jangan sakiti yang lain dan jaga TPS dari kecurangan. Jangan terlena dan seolah-olah sudah menang, terus bekerja keras. Semoga Tuhan meridhoi langkah kita. Amin Jakarta, 19 Maret 2014 Jokowi""

Book Chapter ini merupakan program kerja tahunan Prodi PPKn Undwi yang sudah berjalan selama ini. Program ini dinilai penting, karena memberikan manfaat yang besar kepada dosen guna melatih keterampilannya untuk berpikir kritis dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berbobot. Penulisan Book Chapter ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas publikasi ilmiah dosen.

Buletin Perpustakaan Bung Karno. Th. XI / Vol. 1 / 2019

Upaya Internalisasi Nilai - Nilai Kebangsaan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Dari Berbagai Perspektif Keilmuan

Indonesia Memilih Jokowi

Pancasila - Eksistensi dan Aktualisasi

Mimbar kekarya ABRI.

Internalisasi Sportivitas pada Pendidikan Jasmani

Di tengah arus perkembangan zaman, Pancasila tetap dijaga keberadaannya untuk terus diteguhkan menjadi identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Diskursus-diskursus akademik adalah salah satu upaya yang dilakukannya. Diskursus ini terinspirasi dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pergerakan jaman dulu seperti Budi Utomo, Indonesische Studieclub, dan Algemene Studieclub.

Buku ini merupakan pengupayaan akademik yang berkaitan dengan ke-Pancasila-an secara dialogis. Kemudian Pancasila didudukkan sebagai basis moral dari segi pendidikan kemanusiaannya, nilai-nilai kebudayaan dan kecenderungan tantangan yang disebabkan pengaruh globalisasi dan paham-paham internasional. Maka tidak berlebihan jika isi buku ini sangat relevan untuk dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi para pemerhati kebangsaan dan para Pancasilais yang memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib bangsa ini.

Buku Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila:Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) (Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres Pancasila VII) berisi kumpulan makalah peserta Kongres Pancasila VII yang diselenggarakan tanggal 31 Juni - 1 Mei 2015 di Yogyakarta atas kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dengan

Universitas Mulawarman. Makalah-makalah tersebut memuat paparan dengan tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila:Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)" dengan sub tema 1). Kedaulatan Politik: Penguatan Ideologi Pancasila di Kawasan 3T, 2). Kedaulatan Ekonomi: Penguatan Kebijakan PengelolaanKawasan 3T, 3). Kepribadian dalam Kebudayaan dan Pendidikan: Penguatan Kedaulatan Bangsa di Kawasan 3T. Agar berbagai pemikiran dan pendapat yang berkembang selama Kongres Pancasila VII dan kesepakatan peserta kongres dapat disebarluaskan kepada masyarakat, penyelenggara menyepakati untuk menerbitkan makalah-makalah dalam bentuk buku, agar kegiatan tersebut dapat didokumentasikan dengan sistematis agar tetap dapat dibaca walau kegiatan sudah lama berlalu. Kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Senat Akademik (SA) UGM, Sekertariat Eksekutif UGM, Direktorat Kerjasama UGM, Direktorat Penelitian UGM, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UGM, Fakultas Filsafat UGM, Kedaulatan Rakyat atas terselenggaranya Kongres Pancasila VII. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun buku makalah call for papers kongres Pancasila VII yang telah bekerja dengan keras dan cermat dalam menyusun buku ini. Semoga Buku ini bisa menjadi tambahan referensi dalam memperkaya kajian kajian tentang Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa memiliki kesejarahannya sendiri. Sejak perumusan di BPUPKI hingga masa paska Reformasi, telah muncul berbagai tafsir dan penjabaran strategis atas nilai-nilai Pancasila. Pada masanya, tafsir Pancasila pernah terseret dalam pertentangan ideologis yang nyaris memecah belah bangsa, sebagaimana terjadi pada masa Konstituante hingga tragedi bangsa di tahun 1946/ Belajar dari konflik ideologi di masa sebelumnya, rezim Orde Baru kemudian mengedepankan pembangunan ekonomi dengan menekan secara kuat konflik-konflik ideologis dengan menggunakan jargon Pancasila dala sebagai azas tunggal. Lepas dari represi ideologis dengan tafsir tunggalnya, bangsa Indonesia masuk dalam euforia kebebasan, yang juga berimbas pada terpinggirkannya Pancasila dalam wacana kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan sampai pada detik ini kemerdekaan yang kita peroleh masih bersifat "semu". Secara prinsipal, bangsa ini masih terjajah dalam semua bidang baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.

Persepsi dan Sikap Warga Negara terhadap Pancasila

Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an

ICSSD 2020

Media Informasi dan Pemikiran Bung Karno untuk Indonesia

Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan

Social Theory and Global Culture